

Dari Kebijakan ke Lapangan: Mengapa Proyek Rendah Karbon Sulit Mendapat Pendanaan

Penulis : ICSP (SSH)
Keterangan : CONFERENCE HIGHLIGHTS
The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 - "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact"
Sesi : Executive Dialogue: "Financing the Just Transition: Aligning Capital with Climate & Social Goals"



Diskusi diawali dengan peran lembaga keuangan sebagai penyalur modal. Prinsip dan inisiatif global mendorong bank dan perusahaan asuransi menyelaraskan operasional, tata kelola, dan budaya organisasi dengan komitmen iklim nasional serta Perjanjian Paris, memilih area dampak prioritas, lalu menetapkan target yang terukur. Isu iklim juga semakin dikaitkan dengan alam, ekonomi inklusif, dan hak asasi manusia karena semuanya saling terkait.

Dari sisi praktik pembiayaan iklim, Executive Director Indonesia Climate & Growth Dialogue (ICGD), Paul Butarbutar, yang sebelumnya memimpin Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), menilai ekosistem kebijakan Indonesia sudah relatif siap. Kesenjangan paling kritis, menurutnya, ada pada penerjemahan kebijakan ke pelaksanaan di lapangan.

"Kalau menurut saya sudah banyak sekali hal yang disiapkan oleh pemerintah di level kebijakan, mungkin kebijakan kita salah satu yang paling lengkap. Insentif ada

dan segala macamnya. Tapi yang selalu menjadi masalah kita adalah bagaimana mengonversi level kebijakan ini ke level operasional," ujar Paul.

Kesenjangan itu tampak pada proyek yang siap didanai, yang jumlahnya masih sedikit. Dari komitmen JETP sekitar USD 21 miliar, yang sudah menjadi investasi kurang dari USD 4 miliar, sementara potensi panas bumi baru terkonversi sekitar 1-2 gigawatt dari sekitar 27 gigawatt. Hambatannya antara lain pengadaan dan perjanjian jual beli listrik yang menyimpan risiko, serta biaya dana yang tinggi, dengan pinjaman dolar AS untuk energi terbarukan disebut sekitar 8-9 persen. Menurut Paul, aturan yang berjangka panjang dan tidak berubah-ubah akan mengurangi risiko, karena ketidakpastian membuat biaya pembangunan pembangkit (EPC; engineering, procurement, and construction) meningkat.

Namun pendanaan tidak selalu harus bersumber dari pemerintah. Paul mencontohkan penangkapan gas suar bakar (flare) di fasilitas migas yang diolah menjadi gas kering, LPG, dan kondensat, dengan investasi pihak ketiga yang kembali melalui penjualan kredit karbon. Pemanfaatan gas buang sebagai bahan bakar juga sudah berjalan di sejumlah fasilitas, menunjukkan bahwa pendekatan kreatif dapat membuka sumber pendanaan baru.

Dari sisi sektor keuangan, kebutuhan yang mengemuka adalah harmonisasi kebijakan antarregulator, klasifikasi aktivitas keberlanjutan yang seragam, dan insentif yang lebih kuat karena instrumen nonfiskal saja terbatas. Perbankan juga mengharapkan dorongan regulasi yang merata agar tidak hanya bank besar yang diarahkan, sementara pelaku usaha di sektor riil kerap menunggu kewajiban sebelum bertindak. Peta jalan keuangan berkelanjutan yang tengah disusun diharapkan menjadi sarana koordinasi.

Pendekatan pembiayaan juga mulai menggabungkan perbankan, asuransi, dan blended finance, antara lain untuk melindungi UMKM yang bergantung pada kredit dan rentan terhadap cuaca ekstrem. Dari sisi keadilan, perusahaan yang mengubah arah bisnis perlu memikirkan realokasi sumber daya manusia, peningkatan keterampilan, dan upaya meminimalkan pemutusan hubungan kerja, sementara anak muda dan masyarakat sipil dapat berperan lewat edukasi publik dan pengawasan aspek sosial proyek.

Dalam diskusi yang sama, Senior Vice President Financial Planning & Performance PT Pertamina (Persero), Palti Ferdico TH Siahaan sekaligus Anggota Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) berpendapat kelayakan finansial menjadi kunci. Ia menilai pembiayaan bank yang lebih murah bagi proyek hijau baru efektif bila pemegang saham juga menerima imbal hasil minimum yang lebih rendah, sementara kepastian pembeli lewat kebijakan, seperti kewajiban pencampuran biodiesel berbasis FAME (fatty acid methyl ester) dan rencana pencampuran etanol, membantu proyek menjadi bankable. Kebijakan semacam itu juga mendorong perusahaan menyesuaikan strategi, antara lain memperkuat petrokimia dan menjajaki bahan baku nabati.

Namun industri membutuhkan kebijakan yang harmonis di Indonesia. Menurut Palti, tanpa kebijakan penyeimbang seperti pajak karbon, perubahan akan berjalan lambat karena perusahaan yang beralih tidak memperoleh keunggulan ekonomi dibanding yang tidak. Ia juga mengingatkan potensi greenflation, yakni kenaikan harga mineral

ketika banyak pihak beralih ke energi bersih, yang dapat membuat ekonomi lebih mahal.

"Semua pihak untuk mencapai tujuan ini memang enggak bisa dari sisi korporasi sendiri. Dari sisi regulator, dukungan ini sangat penting agar menjadi ekonomis. Jadi not only financing the transition, tetapi bagaimana transisi tersebut financeable," ujar Palti.

Untuk itu, ia menyoroti tantangan menurunkan target nasional menjadi target perusahaan ketika ekosistemnya belum mengikat. Menurutnya, laporan keuangan diwajibkan undang-undang dan disertai sanksi, sedangkan PSPK 1 dan 2, standar nasional yang mengadopsi IFRS S1 dan S2, saat ini masih bersifat sukarela dan dijadwalkan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Akibatnya, perusahaan kini menyusun analisis skenario sendiri, padahal tujuan nasional idealnya diterjemahkan lewat skenario nasional untuk tiap industri.

"Just transition ini bukan dilihat secara biner antara fosil atau renewable energy. Ujung-ujungnya adalah bagaimana investasi di bidang energi terbarukan atau yang rendah karbon ini tetap harus bisa minimum break even [setidaknya mencapai titik impas], karena bagaimanapun kita butuh pendanaan. Kalau NPV [net present value, nilai kini bersih] negatif dan IRR [internal rate of return, tingkat pengembalian internal] di bawah hurdle rate [imbalance minimum yang disyaratkan], ini tentunya tidak bankable untuk dibiayai," ujar Palti.

Artikel ini merupakan CONFERENCE HIGHLIGHTS dari acara The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 - "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact, khususnya pada sesi Executive Dialogue: "Financing the Just Transition: Aligning Capital with Climate & Social Goals".

Artikel ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Indonesia disediakan untuk memudahkan akses bagi pembaca Indonesia.